

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Otonomi Daerah adalah proses yang memerlukan terlibatnya segenap unsur lapisan masyarakat serta memberikan kekuasaan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sehingga peran pemerintah adalah sebagai katalisator dan fasilitator karena pihak pemerintah yang lebih mengetahui sasaran dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Sebagai katalisator dan fasilitator tentunya membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung lainnya dalam rangka terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan.

Menurut Zeyn (2011) mengukur keberhasilan kebijakan idealnya diletakkan pada kerangka kontinum waktu panjang, tidak hanya sesaat. Kendatipun reformasi memaksa terjadinya perubahan struktur dengan penyesuaian daerah otonom, dimana disadari pemerintahan tidak lagi bercorak korporatif dan sentralistik pada kepemimpinan *top executive* ditangan bupati/walikota. Politisasi birokrasi yang masih cukup kental mewarnai dinamika otonomi daerah. Hal ini erat kaitannya juga dengan kegagalan hubungan kelembagaan eksekutif dan legislatif, karena proses menguatnya *political society*.

Terjadinya krisis di Indonesia disebabkan oleh tata kelola yang buruk (*bad governance*) pada sebagian besar pelaku ekonomi (publik dan swasta). Salah satu usaha memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan

mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah *Good Governance*. Oleh karena itu, tuntutan terhadap terwujudnya *good governance* (tata kelola yang baik) sangat diperlukan terutama di instansi pemerintahan (Kodrat:2010).

Pada tahun 2005, Indonesia memasuki era baru transparansi dan akuntabilitas di bidang keuangan negara. Dengan memasuki era baru ini, perbandingan dan pengukuran antar pelaporan keuangan dapat dilakukan. Sehingga praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam sistem pengelolaan keuangan Negara dan keuangan daerah dapat terlihat jelas (Sulani:2009).

Transparansi dan akuntabilitas publik pada era otonomi daerah telah menjadi tujuan terpenting dari reformasi sektor publik di Indonesia. Pada dasarnya transparansi dan akuntabilitas publik tersebut tidak hanya menjadi masalah negara berkembang seperti Indonesia saja, namun negara yang sudah maju sekalipun terus berusaha memperbaiki praktek akuntabilitas lembaga sektor publiknya.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, penyusunan penyajian laporan keuangan pusat dan daerah didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sehingga, Standar Akuntansi Pemerintahan dapat disimpulkan sebagai alat untuk memfasilitasi pelaporan yang semakin transparan dan akuntabel. Inilah untuk pertama kalinya Indonesia memiliki Standar Akuntansi Pemerintahan. Terbitnya SAP ini merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat Indonesia terhadap terciptanya *Good Governance* dalam pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik terutama dibidang keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan dilingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (SAP:2005).

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan keandalan dalam pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 atau disebut juga dengan PP No.24 Tahun 2005 yang kemudian sekarang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 atau disebut dengan PP No.71 Tahun 2010. Ini merupakan langkah yang dinantikan bahwa isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD haruslah disusun dan disajikan sesuai dengan SAP.

Terdapat perbedaan antara PP No.24 Tahun 2005 dengan PP No.71 Tahun 2010. Dimana, PP No.24 Tahun 2005 adalah SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI yaitu, SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akruaI. Sedangkan PP No.71 Tahun 2010 adalah SAP berbasis akruaI yaitu, mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP Berbasis AkruaI karenalaporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis AkruaI dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah.

Azhar (2007) telah melaksanakan penelitian tentang “Pengaruh Sumber daya Manusia dan Perangkat Pendukungnya Terhadap Keberhasilan Penerapan Permendagri 13 Pada Pemerintah Kota Langsa”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa : Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukungnya mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan Permendagri 13.

Indah (2008) telah melaksanakan penelitian tentang “Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukungnya Terhadap Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 pada Pemerintahan Kota Medan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa : Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukungnya mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005.

Sulani (2009) telah melaksanakan penelitian tentang “Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 pada Pemerintah kabupaten Labuhan Batu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa : Sumber Daya Manusia, Komitmen, dan Perangkat Pendukung secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005. Namun, secara parsial sumber daya manusia dan perangkat pendukung berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, sedangkan komitmen memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005.

Penelitian ini merupakan replikasi atas penelitian yang dilakukan oleh Sulani. Perbedaan antara penelitian ini dengan Sulani yaitu, terletak pada perbedaan lokasi penelitian, waktu, serta penambahan variabel. Variabel yang dimaksud yaitu, motivasi dan budaya organisasi. Alasan penulis memilih variabel motivasi adalah ingin mengetahui berpengaruh atau tidaknya suatu motivasi seseorang demi terciptanya pekerjaan agar mendapat hasil yang terbaik. Karena jika pegawai menanamkan motivasi kerja yang tinggi akan menghasilkan suatu hasil yang memuaskan. Sedangkan alasan penulis memilih variabel budaya organisasi adalah ingin mengetahui seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Oleh karenanya, dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi yang tinggi dan budaya organisasi yang baik dapat pula mempengaruhi keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Pengelolaan keuangan publik di Kota Medan masih mengalami banyak kendala. Salah satu kendala tersebut karena tidak sejalannya dunia pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia yang ada dengan dunia praktis pemerintahan. Oleh karena itu, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang ada mengalami kesulitan dalam menjalani dan menerapkan SAP Berbasis Akrua.

Mengingat pentingnya hal diatas, penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh dari Sumber Daya Manusia, Komitmen, Motivasi, Budaya Organisasi, dan Perangkat Pendukung terhadap keberhasilan penerapan SAP Berbasis Akrua dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Pemerintah Kota Medan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan penelitian yaitu:

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerapan SAP Berbasis AkruaI ?
2. Apakah komitmen berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerapan SAP Berbasis AkruaI ?
3. Apakah motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerapan SAP Berbasis AkruaI ?
4. Apakah budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerapan SAP Berbasis AkruaI ?
5. Apakah perangkat pendukung berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerapan SAP Berbasis AkruaI ?

1.3 Batasan Masalah

Atas pertimbangan ,minat, keterbatasan waktu, dan pengetahuan penulis serta untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis melakukan beberapa batasan masalah terhadap penelitian yang akan diteliti, yaitu penulis hanya membatasi masalah hanya pada faktor Sumber Daya Manusia, Komitmen, Motivasi, Budaya Organisasi dan Perangkat Pendukung yang mempengaruhi SAP Berbasis AkruaI di Kota Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah sumber daya manusia, komitmen, motivasi, budaya organisasi dan perangkat pendukung berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Kota Medan.

1.5 Tujuan Penelitian

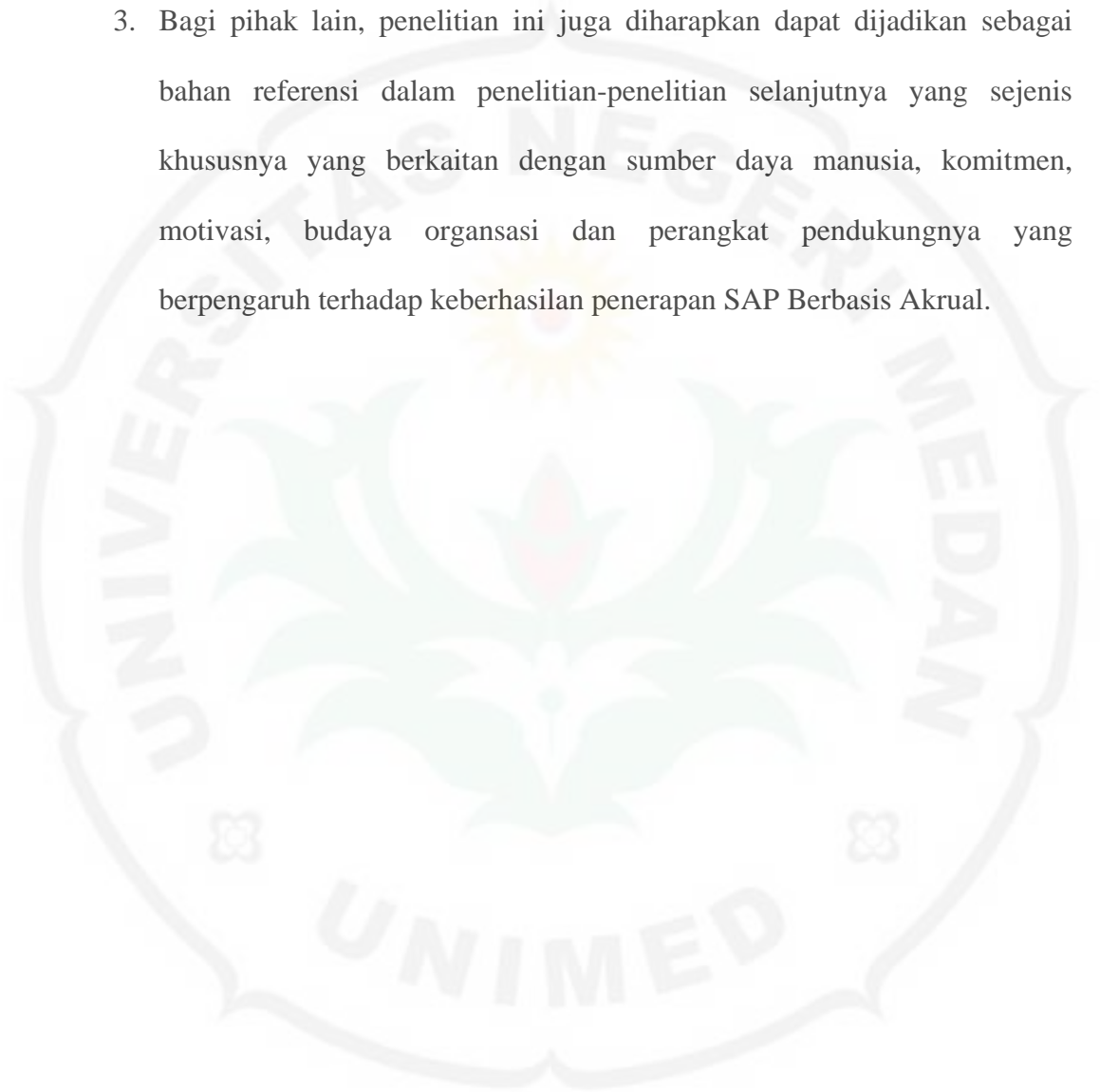
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP Berbasis Akrua di Pemerintahan Kota Medan yang diantaranya sumber daya manusia, komitmen, motivasi, budaya organisasi dan perangkat pendukungnya.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh sumber daya manusia, komitmen, motivasi, budaya organisasi dan perangkat pendukungnya terhadap keberhasilan penerapan SAP Berbasis Akrua.
2. Bagi Pemerintah Daerah, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait di Pemerintahan Daerah. Disamping itu, Pemerintah dapat melakukan pembenahan terhadap sumber daya manusia, komitmen, motivasi, budaya organisasi dan perangkat pendukung yang ada.

3. Bagi pihak lain, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia, komitmen, motivasi, budaya organisasi dan perangkat pendukungnya yang berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan SAP Berbasis Akruar.



THE
Character Building
UNIVERSITY